

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAN DAN DESA
KOTA DENPASAR**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas salah satunya menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar sebagai bagian dari instansi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar. Laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Denpasar, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kota Denpasar



I Wayan Budha, S.IP., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19700715 199201 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vii
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	1
I. Laporan Realiasi Anggaran.....	3
II. Neraca.....	5
III. Laporan Operasional.....	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	10
V. Catatan atas Laporan Keuangan	11
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1. Maksud & Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	12
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	13
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	14
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERA KEUANGAN.....	16
2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	16
2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	18
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI	19
3.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan	19
3.2. Dasar penyusunan dan Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	23
3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	23
3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP	27

BAB IV	PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN	
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.....	29
4.1.	Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	29
4.1.1.	Pendapatan	29
4.1.2.	Belanja	29
4.1.3.	Transfer	32
4.1.4.	Pembiayaan	32
4.2.	Pos-pos Neraca	32
4.2.1.	Aset Lancar	32
4.2.2.	Aset Tetap	34
4.2.3.	Aset Lainnya	38
4.2.4.	Kewajiban	39
4.2.5.	Ekuitas	40
4.3.	Pos-pos Laporan Operasional	40
4.3.1.	Pendapatan	40
4.3.2.	Beban	40
4.3.3.	Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Opersional.....	42
4.4.	Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	42
4.4.1.	Ekuitas Awal	42
4.4.2.	Surplus (Defisit LO)	42
4.4.3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	43
4.4.4.	Ekuitas Akhir	43
BAB V	PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.....	44
BAB VI	PENUTUP.....	45
 LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2024	16
2.2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Program & Kegiatan TA 2024	16
4.1. Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 & 2023	29
4.2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Program TA 2024	29
4.3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2024	30
4.4. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 & 2023	30
4.5. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung TA 2024 & 2023	31
4.6. Perbandingan Realisasi Belanja Barang & Jasa TA 2024 & 2023	31
4.7. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan & Mesin TA 2024 & 2023	32
4.8. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 & 2023	33
4.9. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	33
4.10. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 & 2023	34
4.11. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2024 & 2023	34
4.12. Rincian Aset Tanah per 31 Desember 2024	35
4.13. Rincian Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024	36
4.14. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024	37
4.15. Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2024 & 2023	38
4.16. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 & 2023	39
4.17. Rincian Beban Penyusutan TA 2024 & 2023	42
5.1. Nomor Rekening & NPWP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	21
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Saldo Kas di Pemegang Kas (Bendahara) Tahun 2024
- Lampiran 2 Aset Tetap Tahun 2024
- Lampiran 3 Daftar Persediaan/Sisa Barang Tahun 2024
- Lampiran 4 Laporan Pencapaian Kinerja Kegiatan Tahun 2024
- Lampiran 5 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024
- Lampiran 6 Kewajiban Kepada Negara (Pajak) Tahun 2024
- Lampiran 7 Dana Bergulir Tahun 2024
- Lampiran 8 Belanja Modal Tahun 2024
- Lampiran 9 Laporan Realisasi Anggaran Tunai, Non Tunai dan LRA64 Tahun 2024
- Lampiran 10 Laporan Neraca Tahun 2024
- Lampiran 11 Laporan Operasional Tahun 2024
- Lampiran 12 Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024



ပိတိၵ်ႉတူၵ်ႉတၢ်တူၵ်ႉတၢ်တူၵ်ႉ

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

မိူၼ်တၢ်ပိူၼ်ႈတၢ်တူၵ်ႉတၢ်တူၵ်ႉတၢ်တူၵ်ႉ

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR

တၢ်ပိူၼ်ႈတၢ်တူၵ်ႉတၢ်တူၵ်ႉတၢ်တူၵ်ႉတၢ်တူၵ်ႉတၢ်တူၵ်ႉတၢ်တူၵ်ႉတၢ်တူၵ်ႉ

Jalan Hayam Wuruk No. 69 Denpasar, Telp. (0361) 262262,262496.,Fax.(0361) 262262

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan

Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Denpasar, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kota Denpasar

I Wayan Budha, S.IP., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19700715 199201 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.0 sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 13.006.056.426,00 (84,90%) yang meliputi belanja operasional senilai Rp. 12.895.864.426.00 atau sebesar (84,85%) dan belanja modal sebesar Rp. 110.192.000,00 atau sebesar (91,37%) dari jumlah anggaran sebesar Rp. 15.318.799.946,00 yang terdiri belanja operasi Rp. 15.198.196.946,00 dan belanja modal Rp. 120.603.000,00.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 1.606.095.585,71 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 6.715.500,00 aset tetap sebesar Rp. 1.599.380.085,71 dan aset lainnya sebesar Rp. 0,00

Nilai kewajiban dan ekuitas dana masing-masing sebesar Rp. 6.716.981,00 dan Rp. 1.599.378.604,71

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai

dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.0, sedangkan jumlah beban operasi adalah sebesar Rp. 13.076.828.999,00. Kegiatan Non Operasional surplus sebesar Rp. 0,00 dan Pos-Pos Luar Biasa terdapat beban luar biasa sebesar Rp.(0,00) sehingga jumlah beban menjadi Rp. 13.076.828.999,00 dan entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. 13.076.828.999,00.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp. 1.670.151.177,71 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. 13.076.713.999,00 kemudian ditambah RK PPKD sebesar Rp. 13.006.056.426,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp. 1.599.378.604,71.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1.	PENDAPATAN	-	-	0.00%	-
1.1	Pendapatan Asli Daerah	-	-	0.00%	-
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah				
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah				
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
1.1.4.	Lain-lain PAD yang Sah				
1.2.	Pendapatan Transfer	-	-	0.00%	-
1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
1.2.2.	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
1.2.3.	Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya				
1.2.4.	Bantuan Keuangan				
1.3	Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	0.00%	-
1.3.1.	Pendapatan Hibah				
1.3.3.	Pendapatan Lainnya				
2.	BELANJA	15,318,799,946.00	13,006,056,426.00	84.90%	10,869,676,762.00
2.1.	Belanja Operasi	15,198,196,946.00	12,895,864,426.00	84.85%	10,682,886,481.00
2.1.1.	Belanja Pegawai	6,375,707,275.00	4,680,031,611.00	73.40%	4,259,406,673.00
2.1.2.	Belanja Barang dan jasa	8,822,489,671.00	8,215,832,815.00	93.12%	6,343,479,808.00
2.1.5.	Hibah	-	-	#DIV/0!	80,000,000.00
2.1.6.	Bantuan Sosial				
2.2.	Belanja Modal	120,603,000.00	110,192,000.00	91.37%	186,790,281.00
2.2.1.	Belanja Tanah				
2.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	120,603,000.00	110,192,000.00	91.37%	186,790,281.00
2.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan				
2.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
2.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya				
2.3.	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
2.3.1.	Belanja Tak Terduga				
3.	TRANSFER	-	-	-	-
3.1.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	-	-	-	-
3.1.1.	Bagi Hasil Pajak Daerah				
3.2.	Transfer Bantuan Keuangan	-	-	-	-
3.2.2.	Bantuan Keuangan ke Desa				

3.2.3.	Bantuan Keuangan Lainnya				
	JUMLAH BELANJA & TRANSFER (2+3)	15,318,799,946.00	13,006,056,426.00	84.90%	10,869,676,762.00
	SURPLUS (DEFISIT)-LRA (1-(2+3))	(15,318,799,946.00)	(13,006,056,426.00)	84.90%	(10,869,676,762.00)
4.	PEMBIAYAAN				
4.1.	Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-
4.1.1.	Penggunaan SILPA				
4.2.	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
4.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah				
	Pembiayaan Neto (4.1-4.2)	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(15,318,799,946.00)	(13,006,056,426.00)	84.90%	(10,869,676,762.00)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR**NERACA**

Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023
I.	ASET		
1.	Aset Lancar		
1	Kas di Kas Daerah		
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	
3	Kas di BLUD		
4	Kas di Bendahara Penerimaan		
5	Kas Lainnya		
6	Bagian Lancar TGR		
7	Penyisihan Piutang TGR		
8	Piutang Pajak		
9	Penyisihan Piutang Pajak		
10	Piutang Retribusi		
11	Penyisihan Piutang Retribusi		
12	Piutang Hasil Pengelolaan KDYD	-	-
13	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan KDYD		
14	Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi		
15	Penyisihan Piutang Bagi Hasil Provinsi		
16	Piutang Lain-lain		
17	Penyisihan Piutang Lain-lain		
18	Biaya Sewa Dibayar Dimuka		
19	Biaya Asuransi Dibayar Dimuka		
20	Persediaan	6,715,500.00	6,887,812.00
	- ATK	3,401,000.00	2,483,574.00
	- Alat Kebersihan	170,000.00	1,211,564.00
	- Alat Listrik	150,000.00	440,955.00
	- Cetak	844,500.00	551,719.00
	- Kuasi/legas/Materai	150,000.00	200,000.00
	- BBM	2,000,000.00	2,000,000.00
	- Bahan Komputer	-	-
	Jumlah Aset Lancar	6,715,500.00	6,887,812.00
2.	Investasi Jangka Panjang		
1	Investasi Non Permanen		

	Dana Bergulir		
	Penyisihan Dana Bergulir		
	Jumlah Investasi Non Permanen	-	-
2	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3.	Aset Tetap		
1	Tanah	1,121,700,000.00	1,121,700,000.00
2	Peralatan dan Mesin	7,056,414,202.84	7,095,348,702.84
3	Gedung dan Bangunan	328,632,101.71	328,632,101.71
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	24,740,000.00	24,740,000.00
5	Aset Tetap Lainnya	11,625,000.00	11,625,000.00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan		
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(6,943,731,218.84)	(6,910,686,074.84)
	- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6,809,156,395.84)	(6,783,302,393.84)
	- Akumulasi Penyusutan Gedung Bangunan	(115,682,448.00)	(109,109,806.00)
	- Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(7,267,375.00)	(6,648,875.00)
	- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(11,625,000.00)	(11,625,000.00)
	- Dan Lain-Lain		
	Jumlah Aset Tetap	1,599,380,085.71	1,671,359,729.71
4.	Aset Lainnya		
1	Kementrian Dengan Pihak Ketiga		
2	Aset Lain-lain	158,376,500.00	9,250,000.00
3	Akumulasi Penyusutan Aset Lain lain	(158,376,500.00)	(9,250,000.00)
4	Aset Tak Berwujud		
5	Amortisasi ATB		
	Jumlah Aset Lainnya	-	-
	JUMLAH ASET	1,606,095,585.71	1,678,247,541.71
II.	KEWAJIBAN		
1.	Kewajiban Jangka Pendek		
1	Hutang Belanja Pegawai	-	-
	- Gaji		-

	- E-Kinerja	-	-
2	Hutang Belanja Persediaan		-
3	Hutang Belanja Barang dan Jasa	6,716,981.00	8,096,364.00
	- Listrik	6,279,732.00	7,683,986.00
	- Telepon	36,799.00	39,078.00
	- Air	400,450.00	373,300.00
	- Internet	-	-
	- Gaji Non ASN	-	-
	- Iuran BPJS Kesehatan Non ASN	-	-
4	Hutang Belanja Modal	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	6,716,981.00	8,096,364.00
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	6,716,981.00	8,096,364.00
III.	EKUITAS		
1	Ekuitas	1,599,378,604.71	1,670,151,177.71
	JUMLAH EKUITAS DANA	1,599,378,604.71	1,670,151,177.71
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1,606,095,585.71	1,678,247,541.71

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah				
4	Pendapatan Retribusi Daerah				
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
6	Lain-lain PAD yang Sah				
7	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-	
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
10	Dana Bagi Hasil Pajak				
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam				
12	Dana Alokasi Umum				
13	Dana Alokasi Khusus				
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
15	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
16	Dana Penyesuaian				
17	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
18	Transfer Pemerintah Provinsi				
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
20	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
21	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi				
22	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	-	-	-	
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
24	Pendapatan Hibah				
25	Pendapatan Lainnya				
26	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-	
27	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	

28	BEBAN				
29	BEBAN OPERASI				
30	Beban Pegawai	4,680,031,611.00	4,259,406,673.00	420,624,938.00	8.99
31	Beban Barang dan Jasa	8,214,625,744.00	6,345,082,465.00	1,869,428,279.00	22.76
32	Beban Hibah	-	80,000,000.00	(80,000,000.00)	#DIV/0!
33	Beban Bantuan Sosial				
34	Beban Penyusutan	182,171,644.00	4,039,728,922.00	(3,857,557,278.00)	(2,117.54)
35	Beban Amortisasi				
36	Beban Penyisihan Piutang				
37	Beban Lain-Lain				
38	JUMLAH BEBAN OPERASI	13,076,828,999.00	14,724,218,060.00	(1,647,504,061.00)	(12.60)
39	BEBAN TRANSFER				
40	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan				
41	Beban Transfer Bantuan Keuangan				
42	JUMLAH BEBAN TRANSFER				
43	SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
44	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	-	-		
45	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
46	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	-	-	-	-
47	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
48	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-		
49	JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OP.	-	-	-	-
50	POS LUAR BIASA				
51	Pendapatan Luar Biasa				
52	Beban Luar Biasa	-	-		
53	JUMLAH POS LUAR BIASA	-	-	-	
54	JUMLAH BEBAN	13,076,828,999.00	14,724,218,060		
55	SURPLUS (DEFISIT)-LO	(13,076,828,999.00)	(14,724,218,060)	(1,647,389,061)	12.60

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	2024	2023
1	Ekuitas Awal	1,670,151,177.71	387,772,424.00
2	Surplus (Defisit) LO	(13,076,828,999.00)	(14,724,218,060.00)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		-
	Koreksi Aset Tetap Tanah		
	Koreksi Peralatan dan Mesin		-
	Koreksi Gedung dan Bangunan		
	Koreksi Jalan Irigasi dan Jaringan		
	Koreksi Aset Lain-Lain		
	Koreksi Piutang Deviden		
	Koreksi Penyertaan Modal		
	Koreksi Pendapatan Pajak Daerah		
	Koreksi lain-lain		
	Koreksi Barang masuk antar OPD		-
	Koreksi Dana Bergulir		
	Koreksi Denda Pajak		
	Koreksi Pendapatan Retribusi		
	RK PPKD	13,006,056,426.00	10,869,676,762.00
	RK PPKD Barang	-	-
	Koreksi Barang Masuk Antar OPD	-	5,740,343,601.71
	Koreksi Barang Keluar Antar OPD	-	(603,423,550.00)
4	Ekuitas Akhir	1,599,378,604.71	1,670,151,177.71

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* maka penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan tersebut diserahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan juga peran serta masyarakat.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan pemerintah wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat tersebut akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip *good governance* tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka kepada daerah-daerah diberikan kewenangan didalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah setiap tahunnya serta kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah berupa laporan keuangan setelah tahun anggaran berakhir. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar sebagai bagian dari instansi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan.

Laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Tujuan umum laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024 adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, neraca, laporan operasional dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas;
2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas;
3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang telah ditetapkan;
5. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, ekuitas, belanja, beban dan arus kas.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan laporan keuangan secara normatif merupakan salah satu tugas yang harus dipenuhi oleh SKPD. Peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai landasan hukum penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Denpasar;

10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 57 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Denpasar, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Denpasar;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 5)
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 54);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 Tanggal 27 September 2023;
15. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 Tanggal 27 September 2023.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan

3.2 Dasar penyusunan dan Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DINAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

4.1 Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1.1 Pendapatan

4.1.2 Belanja

4.1.3 Transfer

4.1.4 Pembiayaan

4.2 Pos-pos Neraca

4.2.1 Aset Lancar

4.2.2 Aset Tetap

4.2.3 Aset Lainnya

4.2.4 Kewajiban

4.2.5 Ekuitas

4.3 Pos-pos Laporan Operasional

4.3.1 Pendapatan

4.3.2 Beban

4.3.3 Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional

4.4 Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

4.4.1 Ekuitas Awal

4.4.2 Surplus (defisit) LO

4.4.3 Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar

4.4.4 Ekuitas Akhir

BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN DINAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BAB VI PENUTUP

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar pada Tahun Anggaran 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Realisasi belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 13.006.056.426,00,- atau 84,90% dari anggaran sebesar Rp. 15.318.799.946,00,-.

Adapun realisasi pencapaian target kinerja keuangan per 31 Desember 2024 menurut jenis belanja terperinci pada Tabel 2.1, sedangkan realisasi pencapaian target kinerja keuangan tahun anggaran 2024 menurut program & kegiatan terperinci pada Tabel 2.2

a) Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan TA 2024

**Tabel 2.1
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2024**

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Daya Capai (%)
1	Belanja Operasi, terdiri dari :	15.198.196.946,00	12.895.864.426,00	2.302.332.520,00	84,85%
	a. Belanja Pegawai	6.375.707.275,00	4.680.031.611,00	1.695.675.664,00	73,40%
	b. Belanja Barang & Jasa	8.822.489.671,00	8.215.832.815,00	606.656.856,00	93,12%
	c. Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Belanja Modal	120.603.000,00	110.192.000,00	10.411.000,00	91,37%
	Jumlah	15.318.799.946,00	13.006.056.426,00	2.312.743.520,00	84,90%

b) Ikhtisar Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2024

**Tabel 2.2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Program & Kegiatan Tahun Anggaran 2024**

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Jumlah (Rp)	Daya Capai
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.734.068.696,00	7.906.886.635	81,23%
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.375.707.275,00	4.680.031.611,00	73,40%
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.734.000,00	4.732.000,00	99,96%
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	206.601.500,00	193.809.094,00	93,81%
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.112.000,00	43.213.500,00	89,82%
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.140.000,00	13.104.000,00	99,73%

-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136.829.000,00	97.290.764,00	71,10%
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.603.000,00	110.192.000,00	91,37%
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165.600.00,00	126.015.420,00	76,10%
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.084.425.921,00	2.078.482.846,00	99,71%
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	298.296.000,00	283.732.400,00	95,12%
-	Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00	4.800.000,00	96,00%
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.020.000,00	71.585.000,00	96,71%
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	201.000.000,00	199.898.000,00	99,45%
2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	7.537.000,00	6.367.000,00	84,48%
-	Fasilitasi Kerja Sama ANtar Desa dalam Kabupaten/Kota	7.537.000,00	6.367.000,00	84,48%
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.151.725.650,00	974.708.431,00	84,63%
-	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	283.853.000,00	239.077.569,00	84,23%
-	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	102.560.800,00	89.469.412,00	87,24%
-	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	45.149.550,00	41.252.900,00	91,37%
-	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	362.197.000,00	354.345.000,00	97,83%
-	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	48.610.750,00	48.028.500,00	98,90%
-	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	309.354.550,00	202.535.050,00	65,47%
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4.425.468.600,00	4.118.094.360,00	93,05%
-	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	16.840.000,00	15.755.000,00	93,56%
-	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	249.415.000	236.110.000,00	94,67%
-	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	477.629.000,00	470.301.000,00	98,47%
-	Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	26.828.000,00	26.409.000,00	98,44%
-	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	63.779.000,00	62.957.000,00	98,71%
-	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3.590.977.600,00	3.306.562.360,00	92,08%
	JUMLAH	15.318.799.946,00	13.006.056.426,00	84,90%

2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan adalah:

1. Dalam pengamprahan anggaran induk banyak yang tidak sesuai dengan anggaran per bulan yang telah direncanakan sehingga terjadi penumpukan dalam pengamprahan yang mempengaruhi proses penyerapan anggaran.
2. Penganggaran PPPK tersisa pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dikarenakan penganggaran Gaji dan Tunjangan PPPK tidak sepenuhnya teramprah serta beberapa posisi jabatan kosong sehingga mempengaruhi realisasi Gaji dan Tunjangan ASN.
3. Beberapa Belanja Operasional seperti Jasa yang diberikan pada pihak ketiga/pihak lain tidak teramprah seluruhnya karena kegiatan tidak berjalan.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan keuangan per 31 Desember 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan keuangan ini dihasilkan melalui serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada pemerintah daerah.

3.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pemerintahan daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Berdasarkan Perda Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang diundangkan tanggal 21 Desember 2016 dan berlaku efektif mulai Tahun 2017 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar termasuk dalam entitas akuntansi Tipe B.

Sedangkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Kedudukan:

- a. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- b. Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok:

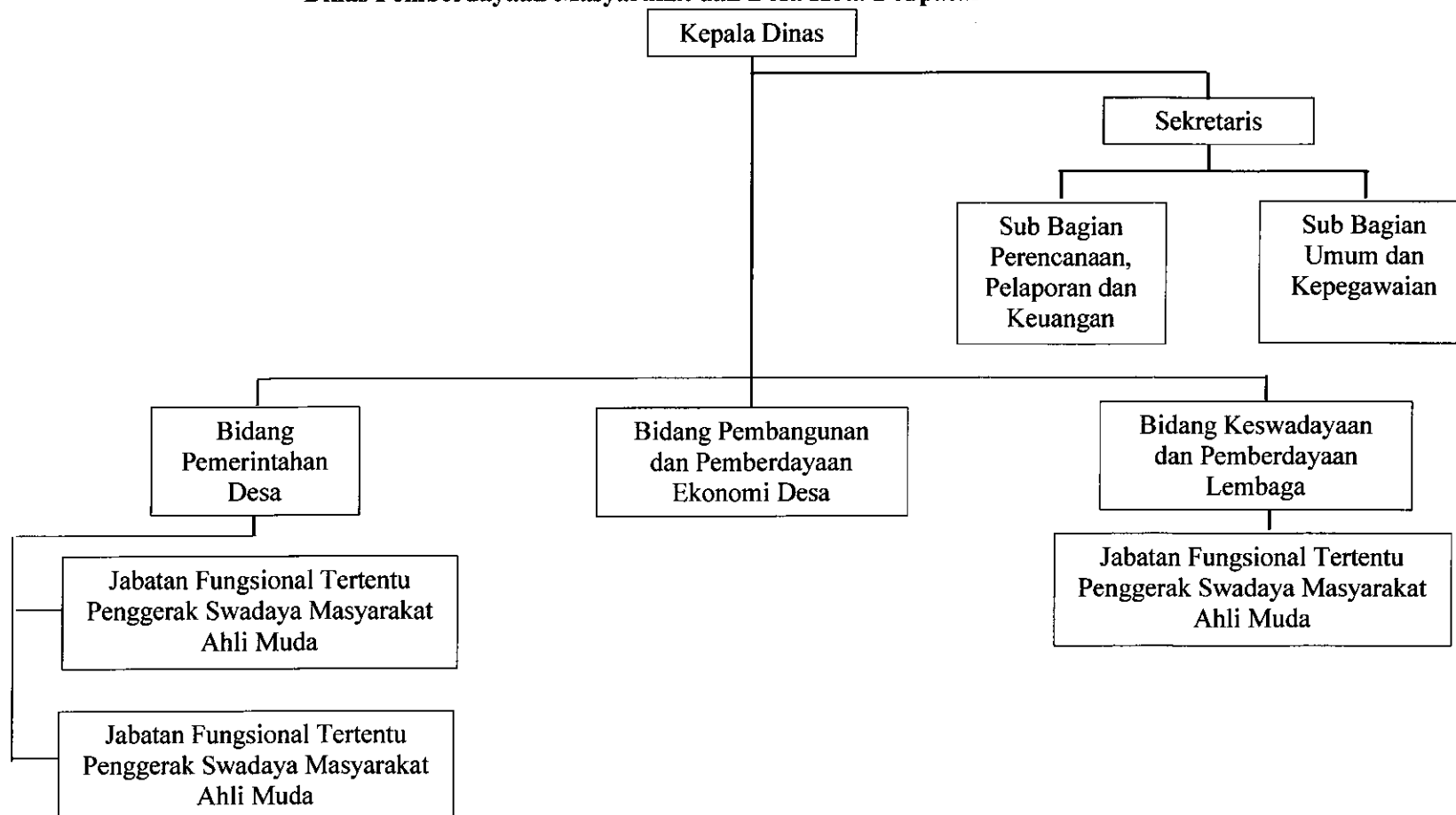
Dinas Daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Dinas Daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa digambarkan dalam Struktur Organisasi sebagai berikut:

Gambar 3.1
STRUKTUR ORGANISASI
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar



Pejabat Struktural Es II dan Es III semester I 2024:

Jabatan	Nama	NIP
Kepala Dinas	I Wayan Budha, S.IP. M.A.P	19700715 199201 1 001
Sekretaris	Tresna Yasa, S.Pt. M.Pd	19711118 199703 1 008
Kabid Pemerintahan Desa	Drs. A. A. Gde Bagus Mahayana	19670125 198902 1 005
Kabid Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Desa	I.B. Wirama Puja Manuaba, S.Kom MM.Kom	19830808 200903 1 006
Kabid Keswadayaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Ni Nyoman Nuriati, SE	19660527 199403 2 008

Pejabat Struktural Es II dan Es III semester II 2024:

Jabatan	Nama	NIP
Kepala Dinas	I Wayan Budha, S.IP. M.A.P	19700715 199201 1 001
Sekretaris	Tresna Yasa, S.Pt. M.Pd	19711118 199703 1 008
Kabid Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Desa	I.B. Wirama Puja Manuaba, S.Kom MM.Kom	19830808 200903 1 006

Bendahara Pengeluaran/BPP dan PPTK 2024:

PA	BP/BPP	PPTK
I Wayan Budha, S.IP. M.A.P	I Nengah Kara Ida Ayu Widya Puspitasari, SE Kadek Sari Asih I Made Suadnyana Putra, SE Muhamad Dedi Herman Syah, S.I.P	Ida Bagus Puja Wirama Manuaba, S.Kom, MM.Kom I Dewa Ayu Istri Idayati, SSTP

Pejabat Pelaksana Anggaran Lainnya Tahun 2024:

Jabatan	Nama	NIP
Pejabat Pembuat Komitmen	Tresna Yasa, S.Pt. M.Pd	19711118 199703 1 008
Pejabat Penatausahaan Keuangan	I Ketut Antara Sukartha, SE	19791118 200902 1 002
Pengurus Barang	I Made Suarnaja	19671231 20080 1 1072
Pengurus Barang Pembantu	I Gst Ngr Ketut Putra Budiarta	19730606 20080 1 1017
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	I Gede Pebry Suryawan, S.E	19970202 202421 1 003
Panitia PPHP	I Ketut Mudita, S.S	19680417 200801 1 009

	Putu Bella Chyntia Dian Utami, STr.IP Maryunani	19980624 202108 2 001 19670521 200701 2 023
--	--	--

3.2. Dasar Penyusunan dan Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- 1) Dasar penyusunan laporan keuangan Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan laporan keuangan disajikan dalam rupiah dan disusun berdasarkan biaya historis (*historical cost*) atau nilai wajar.
- 2) Entitas yang dimaksudkan dalam laporan keuangan ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.
- 3) Laporan Keuangan terdiri dari:
 - a) Laporan Realisasi Anggaran
 - b) Neraca
 - c) Laporan Operasional
 - d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan
 - e) Catatan atas Laporan Keuangan

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar tahun 2024 adalah:

a. Basis Kas (*Cash Basis*)

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis kas digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran.

b. Basis Akrua (*Accrual Basis*)

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Basis akrual digunakan dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konversi-konversi, aturan-aturan, dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Adapun kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

A. Belanja

1. Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomis/jenis belanja dan selanjutnya akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekeningkas daerah. Khusus pengeluaran yang dilakukan melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

3. Pengukuran

Pengukuran Belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang yang dikeluarkan dari kas daerah dan atau akan dikeluarkan. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs Bank Indonesia) pada saat terjadinya belanja.

B. Aset

1. Definisi

Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- **Kas** adalah alat pembayaran yang sah dan setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.
- **Piutang** dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- **Persediaan** dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan harga pembelian.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Aset Tetap dapat berupa tanah; peralatan dan mesin; gedung & bangunan; jalan, irigasi & jaringan; aset tetap lainnya; konstruksi dalam pengerjaan.

c. Aset lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar dan aset tetap. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset lain-lain.
- Aset tak berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan

barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

2. Pengakuan

a. Pengakuan piutang

Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut dan dinilai sebesar nilai nominal. Piutang dinilai berdasarkan nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasi.

b. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Persediaan disajikan pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.

c. Pengakuan Aset Tetap

Suatu aset harus merupakan aset berwujud dan memenuhi kriteria :

1. Masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal.
4. Diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

3. Pengukuran

Persediaan disajikan dengan cara :

1. Menggunakan metode pencatatan *First In First Out* (FIFO);
2. Harga pembelian/perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
3. Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
4. Harga/nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;
5. Dalam hal akhir tahun anggaran, persediaan dicatat menggunakan nilai perolehan terakhir diperoleh/dibeli.

4. Depresiasi/Penyusutan

- Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
- Aset yang dapat disusutkan adalah aset yang :
 - a. Diharapkan dapat digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi;
 - b. Memiliki suatu masa manfaat yang terbatas;
 - c. Ditahan oleh suatu entitas untuk disewakan, atau untuk tujuan administrasi.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.

C. Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

D. Kewajiban

- Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi utang kepada pihak ketiga, utang bunga, belanja yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, bagian lancar utang jangka panjang dan utang jangka pendek lainnya.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

E. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

Pengelola transaksi keuangan dijalankan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dengan menjalankan Sistem Akuntansi SKPD (SAS) yang merupakan bagian integral dari sistem akuntansi pemerintah daerah. Kegiatan akuntansi pada SKPD meliputi pencatatan/penjurnalan atas pendapatan, belanja, aset, dan selain kas. Secara berkala PPK-SKPD melakukan posting buku besar dan secara periodik menyusun neraca saldo sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

Laporan keuangan yang dihasilkan antara lain:

- (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD
- (b) Neraca SKPD
- (c) Laporan Operasional SKPD
- (d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) SKPD
- (e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD

BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

4.1. Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1.1. Pendapatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar hanya mengelola anggaran belanja sehingga tidak memiliki realisasi pendapatan.

Tabel 4.1
Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi Pendapatan		Naik/Turun	
	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Rp	%
Pendapatan	0	0	0	0

4.1.2. Belanja

Realisasi belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 13.006.056.426,00 atau 84.90 % dari anggaran sebesar Rp. 15.318.799.946,00. Anggaran dan realisasi belanja tahun anggaran 2024 menurut program dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Program TA 2024

Kode Program	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	% Realisasi
2.13.2.13.0.00.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.734.068.896,00	7.906.886.635,00	81,23%
2.13.2.13.0.00.003	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	7.537.000,00	6.367.000	84,48%
2.13.2.13.0.00.004	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.151.725.650,00	974.708.431,00	84,63%
2.13.2.13.0.00.005	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4.425.468.600,00	4.118.094.360,00	93,05%
	JUMLAH	15.318.799.946,00	13.006.056.426,00	84,90%

Sedangkan menurut jenis belanja, anggaran dan realisasinya terperinci pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja per 31 Desember 2023

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Daya Capai (%)
1	Belanja Operasi, terdiri dari :	15.198.196.946,00	12.895.864.426,00	2.302.332.520,00	84.85%
	a. Belanja Pegawai	6.375.707.275,00	4.680.031.611,00	1.695.675.664,00	73.40%
	b. Belanja Barang & Jasa	8.822.489.671,00	8.215.832.815,00	606.656.856,00	93.12%
	c. Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Belanja Modal	120.603.000,00	110.192.000,00	0,00	91.37%
	Jumlah	15.318.799.946,00	13.006.056.426,00	10.411.000,00	84.90%

Realisasi belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 13.006.056.426,00 atau (84.90%) dibandingkan anggaran belanja Tahun Anggaran 2023. Adapun rincian serta perbandingan realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Naik/Turun	
		TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Rp	%
1	Belanja Operasional dari	12.895.864.426,00	10.682.886.481,00	2.212.977.945,00	20.72
	a. Belanja Pegawai	4.680.031.611,00	4.259.406.673,00	420.624.938,00	9.88
	b. Belanja Barang & Jasa	8.215.832.815,00	6.343.479.808,00	1.872.353.007,00	29.52
	c. Belanja Hibah	0,00	80.000.000,00	(80.000.000,00)	(100,00)
2	Belanja Modal	110.192.000,00	186.790.281,00	(76.598.281,00)	(41.01)
	Jumlah	13.006.056.426,00	10.869.676.762,00	2.136.379.664,00	19.65

4.1.2.1. Belanja Operasi

Akun ini menggambarkan belanja atau pengeluaran anggaran untuk kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan hibah, serta belanja modal. Realisasi belanja operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 13.006.056.426,00 dan Rp. 10.869.676.762,00 kenaikan realisasi belanja operasional sebesar Rp. 2.212.977.945,00 atau 20.72% disebabkan karena pada tahun ini perekonomian sudah pulih dan membaik sehingga kegiatan serta pelayanan yang dulunya tidak dapat dilakukan pada tahun ini dapat

dilakukan dan dikerjakan kembali. Sehingga menyebabkan meningkatnya belanja operasional guna menunjang pekerjaan serta kegiatan yang telah berjalan, serta adanya kegiatan kegiatan yang baru. Adapun rincian realisasi belanja pegawai dan langsung per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan dalam Tabel 4.5.

A. Belanja Pegawai

Akun ini menggambarkan belanja pegawai yang meliputi belanja gaji dan tunjangan ASN serta tambahan penghasilan ASN. Realisasi belanja pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 4.680.031.611,00 dan Rp. 4.259.406.673,00 kenaikan realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 420.624.938,00 atau 9,88% disebabkan adanya penambahan pegawai ASN (PPPK) yang sudah mulai berlaku bulan Maret 2024.

Adapun rincian realisasi belanja pegawai tidak langsung dan langsung per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan dalam Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Realisasi Belanja		Naik/Turun	
		TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Rp	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.707.251.647,00	1.802.612.696,00	(95.361.049,00)	(5,29)
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.969.779.964,00	2.453.793.977,00	515.985.987,00	21,03
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	3.000.000,00	3.000.000,00	0	-
Jumlah Belanja Pegawai		4.680.031.611,00	4.259.406.673,00	420.624.938,00	(9,88)

B. Belanja Barang & Jasa

Belanja barang dan jasa meliputi belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas. Target anggaran belanja barang dan jasa pada tahun 2024 sebesar Rp. 8.822.489.671,00 realisasinya sebesar Rp. 8.215.832.815,00. atau sebesar (93,75 %) sedangkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp 6.343.479.808,00. Rincian atas realisasi belanja barang & jasa TA 2024 dan 2023 disajikan dalam Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Perbandingan Realisasi Belanja Barang & Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Realisasi Belanja Barang & Jasa		Naik/Turun	
		TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Rp	%
1	Belanja Barang	2.719.059.684,00	2.254.238.439	464.821.245,00	20.62
2	Belanja Jasa	2.386.667.666,00	2.286.180.288	100.487.378,00	4.40

3	Belanja Pemeliharaan	285.283.000,00	129.707.500	155.575.500,00	119.94
4	Belanja Perjalanan Dinas	1.457.052.465,00	1.297.353.581	159.698.884,00	12.31
5	Belanja Barang/Jasa untuk Pihak Ketiga	1.367.770.000,00	376.000.000	991.770.000,00	263.77
Jumlah Belanja		8.215.832.815,00	6.343.479.808,00	1.872.353.007,00	29.52

4.1.2.2. Belanja Modal

Belanja modal dengan target anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 120.603.000,00 dan realisasi pengeluaran sebesar Rp. 110.192.000,00 atau 91,37% sedangkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 186.790.281,00. Belanja Modal tahun 2023 disajikan dalam Tabel 4.7. Rincian selengkapnya belanja modal pada tahun 2024 seperti tercantum pada **Lampiran 8** Catatan atas Laporan Keuangan ini.

Tabel 4.7
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Realisasi Belanja Modal		Naik/Turun	
		TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Rp	%
1.	Pengadaan Mebel	-	47.390.281,00	(0,00)	(0,00)
2.	Pengadaan Alat Pendingin	-	39.400.000,00	(0,00)	(0,00)
3.	Pengadaan Personal Komputer	49.200.000,00	57.750.000,00	8.550.000,00	(17,38)
4.	Pengadaan Komputer Unit Lainnya	0,00	12.000.000,00	(0,00)	(0,00)
5.	Pengadaan Peralatan Komputer Lainnya	0,00	30.250.000,00	(0,00)	(0,00)
6.	Pengadaan Peralatan Personal Computer	32.192.000,00	-	32.192.000,00	(100)
7.	Pengadaan Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	28.800.000,00	-	28.800.000,00	(100)
	Total Belanja Modal Peralatan & Mesin	110.192.000,00	186.790.281,00	69.542.000,00	(69,41)

4.1.3 Transfer

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar hanya mengelola anggaran belanja sehingga tidak memiliki Tranfer Bagi Hasil Pendapatan maupun Transfer Bantuan Keuangan.

4.1.4 Pembiayaan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar hanya mengelola anggaran belanja sehingga tidak memiliki realisasi penerimaan pembiayaan maupun Pengeluaran Pembiayaan

4.2 Pos-Pos Neraca

4.2.1 Aset Lancar

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Nilai aset lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp. 6.715.500,00 dan Rp. 6.887.812,00. Rincian aset lancar pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Aset Lancar	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3.	Piutang Retribusi	0,00	0,00
4.	Piutang Lain-lain	0,00	0,00
5.	Persediaan	6.715.500,00	6.887.812,00
Jumlah Aset Lancar		6.715.500,00	6.887.812,00

4.2.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan ke kas negara per tanggal neraca. Rincian kas di bendahara pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.	Uang Tunai	0	0
2.	Rekening Giro di BPD	0	0
3.	Kuitansi belum di-SPJ-kan	0	0
4.	Panjar Kegiatan	0	0
Jumlah Aset Lancar		0	0

4.2.1.2 Persediaan

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional. Semua barang persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Nilai persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp. 6.715.500,00 dan Rp. 6.887.812,00. Rincian per 31 Desember 2024 dan 31 Desember

2023 tersaji pada Tabel 4.10. Adapun rincian selengkapnya persediaan pada tahun 2024 seperti tercantum pada **Lampiran 3** Catatan atas Laporan Keuangan ini.

Tabel 4.10
Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 & 31 Desember 2023

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Alat tulis kantor	3.401.000,00	2.483.574,00
2.	Cetak	844.500,00	551.719,00
3.	Materai	150.000,00	200.000,00
4.	BBM	2.000.000,00	2.000.000,00
5.	Peralatan Listrik	150.000,00	440.955,00
6.	Peralatan Kebersihan	170.000,00	1.211.564,00
7.	Bahan Komputer	0	0
Jumlah		6.715.500,00	6.887.812,00

4.2.2 Aset Tetap

Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp. 1.599.380.085,71 dan Rp. 1.671.359.729,71 yang merupakan aset berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar. Rincian aset tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11
Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Aset Tetap	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.	Tanah	1.121.700.000,00	1.121.700.000,00
2.	Peralatan & mesin	7.056.414.202,84	7.095.348.702,84
3.	Gedung & bangunan	328.632.101,71	328.632.101,71
4.	Jalan, irigasi & jaringan	24.740.000,00	24.740.000,00
5.	Aset tetap lainnya	11.625.000,00	11.625.000,00
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	0,00	0,00
7.	Akumulasi penyusutan	(6.643.731.218,84)	(6.910.686.074,84)
Jumlah Aset Tetap		1.599.380.085,71	1.671.359.729,71

Adapun rincian selengkapnya rincian aset tetap pada tahun 2024 seperti tercantum pada **Lampiran 2** Catatan atas Laporan Keuangan ini.

4.2.2.1 Tanah

Pada Aset Tanah dalam hal ini tercatatnya Aset Tanah dari Desa yang tercatat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar senilai Rp. 1.121.700.000,00, Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2024 disajikan dalam **tabel 4.12** sebagai berikut :

Tabel 4.12
Tabel Rincian Aset Tanah per 31 Desember 2024

No.	Jenis Barang	Letak/Alamat	Status Tanah	Harga (Rp)	Keterangan	Tanggal & No BAST
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Kecubung Desa Sumerta Kaja	Tanah Hak Pakai / 165	40.000.000,00	BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain	16 Januari 2023 & Nomor : 028/184/BPKAD
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Anggrek Desa Dangin Puri Kangin	Tanah Hak Pakai / 105	67.500.000,00	BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain	16 Januari 2023 & Nomor : 028/184/BPKAD
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Batur Sari Desa Sanur Kauh	Tanah Hak Pakai / 903	225.750.000,00	BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain	16 Januari 2023 & Nomor : 028/184/BPKAD
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Gunung Batukaru No.27 Desa Tegal Kertha	Tanah Hak Pakai / 920	429.630.000,00	BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain	16 Januari 2023 & Nomor : 028/184/BPKAD
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Setiaki No. 35 Desa Dangin Puri Kauh	Tanah Hak Pakai / 300	161.820.000,00	BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain	16 Januari 2023 & Nomor : 028/184/BPKAD
6	Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah	Jl. Tukad Nyali Desa Sanur Kaja	Tanah Hak Pakai / 454	197.000.000,00	BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain	16 Januari 2023 & Nomor : 028/184/BPKAD
Total				1.121.700.000,00		

4.2.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp 7.056.414.202,84 dan Rp. 7.095.348.702,84. Pada tahun 2024 peralatan dan mesin mengalami kenaikan sebesar Rp. 110.192.000,00 Terdiri dari penambahan peralatan dan mesin lainnya dari pengadaan belanja modal (Tabel 4.7)

seperti tercantum pada lampiran VIII. Terjadi pengurangan pada peralatan dan mesin sebesar Rp. 149.126.500,00. Terdiri dari reklas alat kantor, alat komunikasi, dan komputer.

Mutasi nilai peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo awal 1 Januari 2024	Rp. 7.095.348.702,84
Mutasi tambah Peralatan Kantor	
(Pengadaan Rak Besi)	Rp. 28.800.000,00
(Pengadaan PC)	Rp. 41.200.000,00
(Pengadaan Printer)	Rp. 32.192.000,00
(Pengadaan Laptop)	Rp. 8.000.000,00
<i>Jumlah Mutasi tambah</i>	<i>Rp. 110.192.000,00</i>
Mutasi kurang Peralatan dan Mesin	
(Reklas Alat Kantor)	Rp. 125.205.000,00
(Reklas Alat Komunikasri)	Rp. 1.426.500,00
(Reklas Komputer)	Rp. 22.495.000,00
<i>Jumlah Mutasi kurang</i>	<i>Rp. (149.126.500,00)</i>
Saldo s/d 31 Desember 2024	Rp. 7.056.414.202,84
<i>Akumulasi Penyusutan s/d 31 Des 2024</i>	<i>Rp. (6.809.156.395,84)</i>
Nilai Buku s/d 31 Des 2023	Rp. 247.257.807,00

4.2.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yaitu tercatatnya Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar yaitu sebesar Rp. 328.632.101.71 disajikan dalam Tabel 4.13 sebagai berikut :

Tabel 4.13

Tabel Rincian Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024

No.	Jenis Barang	Letak/Alamat	Luas Lantai (m2)	Harga (Rp).	Keterangan	Tanggal & Nomor BAST
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Anggrek Desa Dangin Puri Kangin	270	243.507.600,00	BMD untuk dioperasikan	16 Januari 2023 & Nomor : 028/184/BPKAD

					oleh pihak lain	
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Hayam Wuruk No. 69	745,9	85.124.501,71	Hibah Provinsi Bali	20 September 2023 & Nomor 028/3672/BPKAD
Total				328.632.102,71		

4.2.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar TA 2024 tidak ada perubahan dari TA 2023 sebesar Rp. 24.740.000,00

4.2.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan & mesin, gedung & bangunan serta jalan, irigasi & jaringan. Nilai aset tetap lainnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar TA 2024 tidak ada perubahan dari TA 2023 sebesar Rp. 11.625.000,00.

4.2.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap selain untuk tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp. (6.943.731.218,84). Adapun rincian akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2024 disajikan dalam Tabel 4.14.

Tabel 4.14
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tanah	1.121.700.000,00	0	1.121.700.000,00
2	Peralatan dan Mesin	7.056.414.202,84	(6.809.156.395,84)	247.257.807,00
3	Gedung dan Bangunan	328.632.101,71	(115.682.448,00)	212.949.653,71
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.740.000,00	(7.267.375,00)	17.472.625,00
5	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
6	Aset Tetap Lainnya	11.625.000,00	(11.625.000,00)	0,00
Jumlah		8.543.111.304,55	(6.943.731.218,84)	1.599.380.085,71

4.2.3 Aset Lainnya

Nilai aset lainnya per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15
Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
3.	Kemitraan dengan pihak ketiga	0,00	0,00
4.	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
5.	<i>Amortisasi Aset Tak Berwujud</i>	(0,00)	(0,00)
6.	Aset Lain-Lain	158.376.500,00	9.250.000,00
7.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(158.376.500,00)	(9.250.000,00)
Jumlah Aset Lainnya		0,00	0,00

Jumlah aset lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Aset lainnya terdiri atas aset tak berwujud dan aset kondisi rusak berat. Aset tak berwujud pada tahun 2024 dan tahun 2023 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00. Sedangkan nilai aset lain-lain (aset kondisi rusak berat) sebelum dikurangi akumulasi penyusutan pada tahun 2024 dan tahun 2023 masing-masing sebesar Rp. 158.376.500,00 dan Rp. 9.250.000,00

4.2.3.1 Aset Lain-lain (Aset Kondisi Rusak Berat)

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain, seperti penghentian penggunaan aset tetap pemerintah dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 158.376.500,00

4.2.3.2 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi penyusutan aset lainnya merupakan kontra akun aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset lainnya.

Akumulasi penyusutan untuk aset lain-lain per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp (158.376.500,00)

4.2.3.3 Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud merupakan aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan dimiliki namun tidak mempunyai wujud fisik. Aset tak berwujud pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar tahun 2024 sebesar Rp. 0,00

4.2.3.4 Amortisasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi penyusutan aset lainnya merupakan kontra akun aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset lainnya.

Saldo amortisasi aset lainnya (aset tak berwujud) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. (0,00).

4.2.4. Kewajiban

Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Nilai kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp. 6.716.981,00. dan Rp. 8.096.364,00. Rincian kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2024 disajikan pada Tabel 4.16.

Tabel 4.16
Rincian Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Kewajiban	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Utang Belanja Pegawai	0	0
2.	Utang Belanja Barang dan Jasa	6.716.981,00	8.096.364,00
Jumlah Kewajiban		6.716.981,00	8.096.364,00

4.2.4.1 Utang Belanja

Utang belanja merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Terdapat utang belanja per 31 Desember 2024 berupa belanja barang dan jasa berupa telepon, listrik dan air bulan Januari tahun 2025 sebesar Rp. 6.716.981,00 yang terdiri dari:

- belanja telepon Rp. 36.799,00
- belanja listrik Rp. 6.279.732,00
- belanja air Rp. 400.450,00

4.2.5. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp. 1.599.378.604,71 dan Rp. 1.670.151.177,71. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) seperti tercantum pada **Lampiran LPE** Catatan atas Laporan Keuangan ini.

4.3. Pos-pos Laporan Operasional

4.3.1. Pendapatan

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar tidak terdapat pendapatan baik dari pendapatan daerah, pendapatan transfer maupun pendapatan lain-lain yang sah.

4.3.2. Beban

4.3.2.1. Beban Pegawai

Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Jumlah beban pegawai TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.680.031.611,00 dan Rp. 4.259.406.673,00. Beban Pegawai dapat dijelaskan sebagai berikut :

Realisasi Belanja Pegawai 2024	Rp.	4.680.031.611,00
Hutang Belanja Pegawai 2024	Rp.	0,00
Hutang Belanja Pegawai 2023	Rp.	0,00
<i>Selisih Hutang Belanja Pegawai</i>	<i>(Rp.</i>	<i>0,00)</i>
<i>Beban Pegawai 2024</i>	<i>Rp.</i>	<i>4.680.031.611,00</i>

4.3.2.2. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 8.214.625.744,00 dan Rp. 6.345.082.465,00. Terdapat kenaikan beban barang dan jasa sebesar Rp. 1.869.543.279,00 atau (22,76%) pada TA 2024. Rincian lebih lanjut tentang beban barang dan jasa disajikan dalam lampiran **Laporan Operasional (LO)** Catatan atas Laporan Keuangan ini. Adapun beberapa rincian beban barang dan jasa TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Barang dan Jasa 2024		Rp.	8.214.625.744,00
By Sewa Dibayar Dimuka 2023	Rp.		0,00
By Sewa Dibayar Dimuka 2024	Rp.		0,00
<i>Selisih By Sewa Dibayar Dimuka</i>		<i>Rp.</i>	<i>0,00</i>
persediaan			
Persediaan 2023	Rp.		6.887.812,00
Persediaan 2024	Rp.		6.715.500,00
<i>Selisih Persediaan</i>		<i>(Rp.)</i>	<i>172.312,00</i>
Hutang Persediaan 2023	Rp.		0,00
Hutang Persediaan 2024	Rp.		0,00
<i>Selisih Hutang Persediaan</i>		<i>Rp.</i>	<i>0,00</i>
Hutang Barang dan Jasa 2023	Rp.		8.096.364,00
Hutang Barang dan Jasa 2024	Rp.		6.716.981,00
<i>Selisih Hutang Barang dan Jasa</i>		<i>(Rp.)</i>	<i>1.379.383,00</i>
<i>Beban Barang dan Jasa</i>		<i>Rp.</i>	<i>8.214.625.744,00</i>

4.3.2.3. Beban Penyusutan

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Jumlah beban penyusutan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.943.731.218,84 dan Rp. 6.910.686.074,84. Rincian beban penyusutan untuk Tahun 2024 dan 2023 disajikan pada Tabel 4.17.

Tabel 4.17
Rincian Beban Penyusutan TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Akumulasi Penyusutan		Beban Penyusutan 2024
		2024	2023	
1	Tanah	(0,00)	(0,00)	(0,00)
2	Peralatan dan Mesin	(6.809.156.395,84)	(6.783.302.393,84)	(33.045.144,00)
3	Gedung dan Bangunan	(115.682.448,00)	(109.109.806,00)	(25.854.002,00)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(7.267.375,00)	(6.648.875,00)	(618.500,00)
5	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-
6	Aset Tetap Lainnya	(11.625.00,00)	(11.625.00,00)	(0,00)
7	Aset lain lain	(158.376.500,00)	(9.250.000,00)	(149.126.500,00)
	Jumlah	(6.943.731.218,84)	(6.910.686.074,84)	(215.216.788,00)

4.3.3. Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional

4.3.3.1. Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Terjadi defisit karena Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar tidak mengelola pendapatan. Defisit Penjualan Aset Non Lancar merupakan Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin. Pada Laporan Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar tahun 2024 yang dimasukkan ke dalam Defisit Penjualan Aset Non Lancar yaitu nilai buku dari barang atau aset yang telah dihapuskan. Jumlah Defisit Penjualan Aset Non Lancar Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00

4.4. Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

4.4.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar dan Rp. 1.670.151.177,71 dan Rp. 387.772.424,00. Nilai ekuitas awal Januari 2024 merupakan nilai ekuitas akhir pada Tahun 2023.

4.4.2. Surplus (Defisit) LO

Terjadi defisit LO karena Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar tidak mengelola pendapatan. Defisit LO merupakan selisih kurang antar surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.(13.076.828.999,00) dan Rp.(14.724.218.060,00).

4.4.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar untuk 31 Desember 2024 terdiri dari RK PPKD sebesar Rp. 13.006.056.426,00 berasal dari Realisasi Belanja tahun 2024 pada Laporan LRA Permen 64 dan Neraca2.

4.4.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas awal pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.670.151.177,71 yang merupakan ekuitas akhir pada tahun 2023, RK PPKD sebesar Rp. 13.006.056.426,00, sehingga ekuitas akhir pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 1.599.378.604,71.

BAB V
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

5.1. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar adalah:

Tabel 5.1
Nomor Rekening dan NPWP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar

No.	Nama Bank	Nama Rekening	Nomor Rekening	NPWP
1	Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Utama Denpasar	BENDAHARA PENERLUARAN DPMD KOTA DENPASAR	011.010003065-1	00.275.683.1-903.000

5.2. Pengungkapan Lain-lain

Pejabat Pengelola Keuangan untuk Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

- (1) Pengguna Anggaran : I Wayan Budha, S.IP., M.A.P
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen : Tresna Yasa, S.Pt., M.Pd
- (3) Pejabat Penatausahaan Keuangan : I Ketut Antara Sukartha, SE
- (4) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa : I Gede Pebry Suryawan, S.E
- (5) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
 - (a) Ketua Tim : I Ketut Mudita, S.S
 - (b) Sekretaris : Putu Bella Chyntia Dian Utami, S.Tr.IP
 - (c) Anggota : Maryunani
- (6) Bendahara Pengeluaran : I Nengah Kara

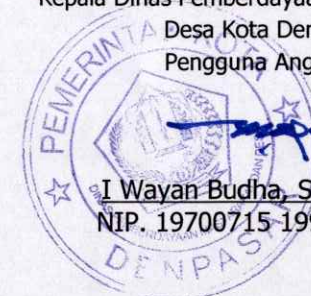
BAB VI PENUTUP

Dalam APBD tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar melaksanakan 4 (empat) program dengan 8 (delapan) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 15.318.799.946,00 yang terdiri dari belanja pegawai Rp. 6.375.707.275,00., belanja barang dan jasa Rp. 8.822.489.671,00., dan belanja modal Rp. 110.192.000,00. Adapun realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 13.006.056.426,00 (84,90%) yang meliputi belanja pegawai senilai Rp. 4.680.031.611,00 atau sebesar 73,40%, belanja barang dan jasa senilai Rp. 8.215.832.815,00 atau sebesar 93,12%, dan belanja modal sebesar Rp. 110.192.000,00 atau sebesar 91,37%. Sedangkan untuk fisik sampai dengan 31 Desember 2024 sudah tercapai sebesar 100%.

ASET TETAP
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR

NO.	URAIAN	SALDO AWAL 01/01'24	PENAMBAHAN 1/1'24 S/D 31/12'24	PENGURANGAN 1/1'24 S/D 31/12'24	SALDO AKHIR 31/12'24
01	Tanah	1,121,700,000.00	-	-	1,121,700,000.00
		1,121,700,000.00			1,121,700,000.00
02	Peralatan dan Mesin	7,095,348,702.84	110,192,000.00	149,126,500.00	7,056,414,202.84
	- Alat Angkutan	5,330,419,500.00			5,330,419,500.00
	- Alat Kantor dan Rumah Tangga	890,241,032.84	28,800,000.00	125,205,000.00	793,836,032.84
	- Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	144,759,170.00	-	1,426,500.00	143,332,670.00
	- Alat Laboratorium	-	-	-	-
	- Komputer	729,929,000.00	81,392,000.00	22,495,000.00	788,826,000.00
	- Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	-
03	Gedung dan Bangunan	328,632,101.71	-	-	328,632,101.71
	Bangunan Gedung	328,632,101.71			328,632,101.71
		-			-
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	24,740,000.00	-	-	24,740,000.00
	- Jaringan	24,740,000.00	-	-	24,740,000.00
		-			-
05	Aset Tetap Lainnya	11,625,000.00	-	-	11,625,000.00
	- Buku dan Perpustakaan	-	-	-	-
	- Barang Bercorak Kebudayaan	11,625,000.00	-	-	11,625,000.00
06	Konstruksi Dalam Pengerjaan				-
	J u m l a h	8,582,045,804.55	110,192,000.00	149,126,500.00	8,543,111,304.55

Denpasar, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kota Denpasar
Pengguna Anggaran



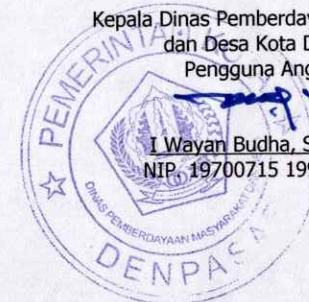
I Wayan Budha, S.IP., M.A.P
NIP. 19700715-199201 1 001

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR
DAFTAR PERSEDIAAN / SISA BARANG
PER 31 Desember 2024

NO	NAMA/JENIS BARANG						JUMLAH
	A T K	Barang Cetak	Barang kuasi/leges	Sparepart/BBM	Alat Listrik	Lain-lain	
1	10	buah	Ball Point Zebra Biru Gel				Rp 210,000
2	10	lusin	Ballpoin Zebra Pic Colour				Rp 260,000
3	5	kotak	Clip Seagul No.5				Rp 290,000
4	6	buah	Post It Sedang 654				Rp 78,000
5	15	rim	Kertas HVS Sinar Dunia 70 Gr, A4				Rp 1,350,000
6	3	kotak	Double Clip (Binder Clip 105)				Rp 156,000
7	6	kotak	Double Clip (Binder Clip 111)				Rp 762,000
8	2	kotak	Double Clip (Binder Clip 155)				Rp 220,000
9	5	buah	Spido! White Board				Rp 75,000
							Rp 3,401,000
1		6	buku	Buku Lembar Disposisi			Rp 252,000
2		2	buku	Cetak Kartu Kendali Surat Keluar			Rp 240,000
3		2	buku	Cetak Kartu Kendali Surat Masuk			Rp 240,000
4		15	buah	Cetak Map Kop OPD			Rp 112,500
							Rp 844,500
1				15 lembar Materai 10.000			Rp 150,000
							Rp 150,000
1				20 Lembar Bahan Bakar Minyak Vocer (Pertamax 100.000)			Rp 2,000,000
							Rp 2,000,000
1					2 Buah	Lampu essential 14 W	Rp 94,000
2					2 Buah	Baterai AAA	Rp 34,000
3					2 Buah	Baterai AA	Rp 22,000
							Rp 150,000
1					2 buah	Kapur Barus Toilet Isi 5 Swallow	Rp 34,000
2					2 buah	Keranjang Sampah	Rp 80,000
3					3 buah	Lap Pel Kain	Rp 42,000
4					4 buah	Lap Piring Kotak-kotak	Rp 14,000
							Rp 170,000
							Rp 6,715,500
				TOTAL			

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kota Denpasar
Pengguna Anggaran

I Wayan Budha, S.IP.,M.A.P
NIP. 19700715 199201 1 001



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
LAPORAN PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR
PER 31 Desember 2024

PROGRAM DAN KEGIATAN		% PENYELESAIAN	WAKTU	ANGGARAN	REALISASI	%
NO	NAMA	PEKERJAAN	PENYELESAIAN	(RP)	(RP)	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
1	BELANJA LANGSUNG	100%	1 Tahun	15,318,799,946	13,006,056,426	84.90%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	1 Tahun	9,734,068,696	7,906,886,635	81.23%
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	1 Tahun	6,375,707,275	4,680,031,611	73.40%
1.2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	1 Tahun	4,734,000	4,732,000	99.96%
1.3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	1 Tahun	206,601,500	193,809,094	93.81%
1.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	1 Tahun	48,112,000	43,213,500	89.82%
1.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	1 Tahun	13,140,000	13,104,000	99.73%
1.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	1 Tahun	136,829,000	97,290,764	71.10%
1.7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	1 Tahun	120,603,000	110,192,000	91.37%
1.8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	1 Tahun	165,600,000	126,015,420	76.10%
1.9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	1 Tahun	2,084,425,921	2,078,482,846	99.71%
1.10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	100%	1 Tahun	298,296,000	283,732,400	95.12%
1.11	Pemeliharaan Mebel	100%	1 Tahun	5,000,000	4,800,000	96.00%
1.12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	1 Tahun	74,020,000	71,585,000	96.71%
1.13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain	100%	1 Tahun	201,000,000	199,898,000	99.45%
2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	100%	1 Tahun	7,537,000	6,367,000	84.48%
2.1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	100%	1 Tahun	7,537,000	6,367,000	84.48%
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	100%	1 Tahun	1,151,725,650	974,708,431	84.63%
3.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	1 Tahun	283,853,000	239,077,569	84.23%
3.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100%	1 Tahun	102,560,800	89,469,412	87.24%
3.3	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	100%	1 Tahun	45,149,550	41,252,900	91.37%
3.4	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	100%	1 Tahun	362,197,000	354,345,000	97.83%
3.5	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	100%	1 Tahun	48,610,750	48,028,500	98.80%
3.6	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	100%	1 Tahun	309,354,550	202,535,050	65.47%
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA	100%	1 Tahun	4,425,468,600	4,118,094,360	93.05%
4.1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga	100%	1 Tahun	16,840,000	15,755,000	93.56%
4.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	100%	1 Tahun	249,415,000	236,110,000	94.67%
4.3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam	100%	1 Tahun	477,629,000	470,301,000	98.47%
4.4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	100%	1 Tahun	26,828,000	26,409,000	98.44%
4.5	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	100%	1 Tahun	63,779,000	62,957,000	98.71%
4.6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan	100%	1 Tahun	3,590,977,600	3,306,562,360	92.08%
	JUMLAH			15,318,799,946	13,006,056,426	84.90%

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kota Denpasar
Pengguna Anggaran



I Wawan Budha, S.IP., M.A.P
NIP. 19700715 199201 1 001

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
PER 31 Desember 2024**

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
	N I H I L				
	JUMLAH				

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kota Denpasar
Pengguna Anggaran

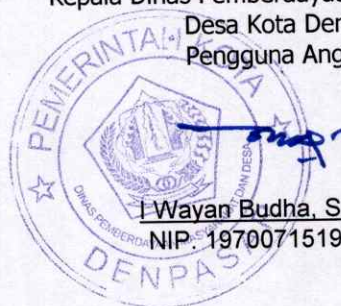


I Wayan Budha, S.IP., M.A.P
NIP. 19700715 199201 1 001

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR
KEWAJIBAN KEPADA NEGARA (PAJAK)
PER 31 Desember 2024

NO.	PAJAK	PUNGUT	SETOR	SISA YANG BELUM DISETOR	KETERANGAN TGL DISETOR
1	Belanja Tidak Langsung - PPh pasal 21 - PPh pasal 22 - PPh pasal 23 - PPh pasal 4 - PPN	- - - - -	- - - - -		
	Jumlah	-	-		Per 31 Desember 2024
2	Belanja Langsung - PPh pasal 21 - PPh pasal 22 - PPh pasal 23 - PPh pasal 4 - PPN	258,906,312 15,431,446 60,599,320 - 342,339,967	258,906,312 15,431,446 60,599,320 - 342,339,967		
	Jumlah	677,277,045	677,277,045		
	JUMLAH	677,277,045	677,277,045		Per 31 Desember 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kota Denpasar
Pengguna Anggaran

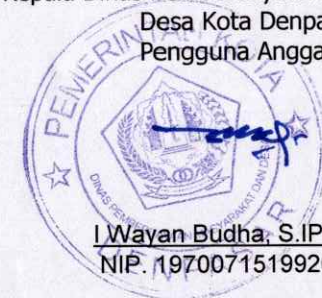


Wayan Budha, S.IP., M.A.P.
NIP. 197007151992011001

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DANA BERGULIR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR
PER 31 Desember 2024

No.	Program	APBN			APBD		
		Awal / Dec-23	Perkembangan Tahun 2024	Akhir/ Dec-24	Awal / Dec-23	Perkembangan Tahun 2024	Akhir/ Dec-24
		Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
		1	2	3 = 1+ 2	1	2	3 = 1+ 2
	NIHIL						

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kota Denpasar
Pengguna Anggaran



I Wayan Budha, S.IP., M.A.P
NIP. 197007151992011001

BELANJA MODAL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR
PER 31 Desember 2024

NO.	URAIAN (JENIS BARANG)	VOL / LUAS / JML BARANG	SATUAN	NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN
01	Tanah				
02	Peralatan dan Mesin -Alat Kantor dan Rumah Tangga -Komputer			110,192,000.00 28,800,000.00 27,800,000.00 13,792,000.00 13,400,000.00 8,000,000.00 18,400,000.00	Rak Besi PC Printer PC Laptop Printer
03	Gedung dan Bangunan			-	
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan			-	
05	Aset Tetap Lainnya			-	
06	Konstruksi Dalam Pengerjaan				
07	Aset Tak Berwujud			-	
				110,192,000.00	

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Dinas Kota Denpasar
Pengguna Anggaran


I Wayan Budha, S.IP., M.A.P
NIP. 1970077151992011001

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TUNAI DAN NON TUNAI
per 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi		Total Realisasi
			Tunai	Non Tunai	
1.	PENDAPATAN	-	-	-	-
1.1	Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah				
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah				
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah				
1.2.	Pendapatan Transfer	-	-	-	-
1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
1.2.2.	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
1.2.3.	Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya				
1.2.4.	Bantuan Keuangan				
1.3	Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-	-
1.3.1.	Pendapatan Hibah				
1.3.3.	Pendapatan Lainnya				
2.	BELANJA	15,318,799,946.00	-	13,006,056,426.00	-
2.1.	Belanja Operasi	15,198,196,946.00	-	12,895,864,426.00	-
2.1.1.	Belanja Pegawai	6,375,707,275.00		4,680,031,611.00	
2.1.2.	Belanja Barang dan jasa	8,822,489,671.00		8,215,832,815.00	
2.1.5.	Hibah	-		-	
2.1.6.	Bantuan Sosial	-			
2.2.	Belanja Modal	120,603,000.00	-	110,192,000.00	-
2.2.1.	Belanja Tanah				
2.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	120,603,000.00		110,192,000.00	
2.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan				
2.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
2.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	-		-	
2.3.	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
2.3.1.	Belanja Tak Terduga				
3.	TRANSFER	-	-	-	-
3.1.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	-	-	-	-
3.1.1.	Bagi Hasil Pajak Daerah				
3.2.	Transfer Bantuan Keuangan	-	-	-	-
3.2.2.	Bantuan Keuangan ke Desa				
3.2.3.	Bantuan Keuangan Lainnya				
	JUMLAH BELANJA & TRANSFER (2+3)	15,318,799,946.00	-	13,006,056,426.00	-

	SURPLUS (DEFISIT)-LRA (1-(2+3))	(15,318,799,946.00)	-	(13,006,056,426.00)	-
4.	PEMBIAYAAN				
4.1.	Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-
4.1.1.	Penggunaan SILPA				
4.2.	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
4.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah				
	Pembiayaan Neto (4.1-4.2)	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(15,318,799,946.00)	-	(13,006,056,426.00)	-

*Permendagri 64

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kota Denpasar
Pengguna Anggaran



I Wayan Budha, S.IP., M.A.P
NIP. 19700715 199201 1 001

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1.	PENDAPATAN	-	-	0.00%	-
1.1	Pendapatan Asli Daerah	-	-	0.00%	-
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah				
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah				
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
1.1.4.	Lain-lain PAD yang Sah				
1.2.	Pendapatan Transfer	-	-	0.00%	-
1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
1.2.2.	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
1.2.3.	Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya				
1.2.4.	Bantuan Keuangan				
1.3	Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	0.00%	-
1.3.1.	Pendapatan Hibah				
1.3.3.	Pendapatan Lainnya				
2.	BELANJA	15,318,799,946.00	13,006,056,426.00	84.90%	10,869,676,762.00
2.1.	Belanja Operasi	15,198,196,946.00	12,895,864,426.00	84.85%	10,682,886,481.00
2.1.1.	Belanja Pegawai	6,375,707,275.00	4,680,031,611.00	73.40%	4,259,406,673.00
2.1.2.	Belanja Barang dan jasa	8,822,489,671.00	8,215,832,815.00	93.12%	6,343,479,808.00
2.1.5.	Hibah	-	-	#DIV/0!	80,000,000.00
2.1.6.	Bantuan Sosial				
2.2.	Belanja Modal	120,603,000.00	110,192,000.00	91.37%	186,790,281.00
2.2.1.	Belanja Tanah				
2.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	120,603,000.00	110,192,000.00	91.37%	186,790,281.00
2.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan				
2.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
2.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya				
2.3.	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
2.3.1.	Belanja Tak Terduga				
3.	TRANSFER	-	-	-	-
3.1.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	-	-	-	-
3.1.1.	Bagi Hasil Pajak Daerah				
3.2.	Transfer Bantuan Keuangan	-	-	-	-
3.2.2.	Bantuan Keuangan ke Desa				
3.2.3.	Bantuan Keuangan Lainnya				
	JUMLAH BELANJA & TRANSFER (2+3)	15,318,799,946.00	13,006,056,426.00	84.90%	10,869,676,762.00
	SURPLUS (DEFISIT)-LRA (1-(2+3))	(15,318,799,946.00)	(13,006,056,426.00)	84.90%	(10,869,676,762.00)
4.	PEMBIAYAAN				
4.1.	Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-
4.1.1.	Penggunaan SILPA				
4.2.	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
4.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah				
	Pembiayaan Neto (4.1-4.2)	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(15,318,799,946.00)	(13,006,056,426.00)	84.90%	(10,869,676,762.00)

*Permendagri 64

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kota Denpasar
Pengguna Anggaran



Wayan Budha, S.IP., M.A.P.
NIP. 197007451992011001

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR

NERACA

Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2024	2023
I.	ASET		
1.	Aset Lancar		
1	Kas di Kas Daerah		
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	
3	Kas di BLUD		
4	Kas di Bendahara Penerimaan		
5	Kas Lainnya		
6	Bagian Lancar TGR		
7	Penyisihan Piutang TGR		
8	Piutang Pajak		
9	Penyisihan Piutang Pajak		
10	Piutang Retribusi		
11	Penyisihan Piutang Retribusi		
12	Piutang Hasil Pengelolaan KDYD	-	-
13	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan KDYD		
14	Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi		
15	Penyisihan Piutang Bagi Hasil Provinsi		
16	Piutang Lain-lain		
17	Penyisihan Piutang Lain-lain		
18	Biaya Sewa Dibayar Dimuka		
19	Biaya Asuransi Dibayar Dimuka		
20	Persediaan	6,715,500.00	6,887,812.00
	- ATK	3,401,000.00	2,483,574.00
	- Alat Kebersihan	170,000.00	1,211,564.00
	- Alat Listrik	150,000.00	440,955.00
	- Cetak	844,500.00	551,719.00
	- Kuasi/legas/Materai	150,000.00	200,000.00
	- BBm	2,000,000.00	2,000,000.00
	- Bahan Komputer	-	-
	Jumlah Aset Lancar	6,715,500.00	6,887,812.00
2.	Investasi Jangka Panjang		
1	Investasi Non Permanen		
	Dana Bergulir		
	Penyisihan Dana Bergulir		
	Jumlah Investasi Non Permanen	-	-
2	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3.	Aset Tetap		
1	Tanah	1,121,700,000.00	1,121,700,000.00
2	Peralatan dan Mesin	7,056,414,202.84	7,095,348,702.84
3	Gedung dan Bangunan	328,632,101.71	328,632,101.71

4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	24,740,000.00	24,740,000.00
5	Aset Tetap Lainnya	11,625,000.00	11,625,000.00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan		
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(6,943,731,218.84)	(6,910,686,074.84)
	- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6,809,156,395.84)	(6,783,302,393.84)
	- Akumulasi Penyusutan Gedung Bangunan	(115,682,448.00)	(109,109,806.00)
	- Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(7,267,375.00)	(6,648,875.00)
	- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(11,625,000.00)	(11,625,000.00)
	- Dan Lain-Lain		
	Jumlah Aset Tetap	1,599,380,085.71	1,671,359,729.71
4.	Aset Lainnya		
1	Kementrian Dengan Pihak Ketiga		
2	Aset Lain-lain	158,376,500.00	9,250,000.00
3	Akumulasi Penyusutan Aset Lain lain	(158,376,500.00)	(9,250,000.00)
4	Aset Tak Berwujud		
5	Amortisasi ATB		
	Jumlah Aset Lainnya	-	-
	JUMLAH ASET	1,606,095,585.71	1,678,247,541.71
II.	KEWAJIBAN		
1.	Kewajiban Jangka Pendek		
1	Hutang Belanja Pegawai	-	-
	- Gaji		
	- E-Kinerja	-	-
2	Hutang Belanja Persediaan		
3	Hutang Belanja Barang dan Jasa	6,716,981.00	8,096,364.00
	- Listrik	6,279,732.00	7,683,986.00
	- Telepon	36,799.00	39,078.00
	- Air	400,450.00	373,300.00
	- Internet	-	-
	- Gaji Non ASN	-	-
	- Iuran BPJS Kesehatan Non ASN	-	-
4	Hutang Belanja Modal	-	
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	6,716,981.00	8,096,364.00
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	6,716,981.00	8,096,364.00
III.	EKUITAS		
1	Ekuitas	1,599,378,604.71	1,670,151,177.71
	JUMLAH EKUITAS DANA	1,599,378,604.71	1,670,151,177.71
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1,606,095,585.71	1,678,247,541.71

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
 dan Desa Kota Denpasar
 Pengguna Anggaran



I. Wayan Budha, S.IP., M.A.P
 NIP. 1970077151992011001

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah				
4	Pendapatan Retribusi Daerah				
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
6	Lain-lain PAD yang Sah				
7	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-	
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
10	Dana Bagi Hasil Pajak				
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam				
12	Dana Alokasi Umum				
13	Dana Alokasi Khusus				
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
15	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
16	Dana Penyesuaian				
17	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
18	Transfer Pemerintah Provinsi				
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
20	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
21	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi				
22	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	-	-	-	
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
24	Pendapatan Hibah				
25	Pendapatan Lainnya				
26	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-	
27	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	
28	BEBAN				
29	BEBAN OPERASI				
30	Beban Pegawai	4,680,031,611.00	4,259,406,673.00	420,624,938.00	8.99
31	Beban Barang dan Jasa	8,214,625,744.00	6,345,082,465.00	1,869,543,279.00	22.76
32	Beban Hibah	-	80,000,000.00	(80,000,000.00)	#DIV/0!
33	Beban Bantuan Sosial				
34	Beban Penyusutan	182,171,644.00	4,039,728,922.00	(3,857,557,278.00)	(2,117.54)
35	Beban Amortisasi				
36	Beban Penyisihan Piutang				
37	Beban Lain-Lain				
38	JUMLAH BEBAN OPERASI	13,076,828,999.00	14,724,218,060.00	(1,647,389,061.00)	(12.60)
39	BEBAN TRANSFER				
40	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan				
41	Beban Transfer Bantuan Keuangan				
42	JUMLAH BEBAN TRANSFER				

43	SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
44	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	-	-		
45	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
46	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	-	-	-	-
47	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
48	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-		
49	JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OP.	-	-	-	-
50	POS LUAR BIASA				
51	Pendapatan Luar Biasa				
52	Beban Luar Biasa	-	-		
53	JUMLAH POS LUAR BIASA	-	-	-	
54	JUMLAH BEBAN	13,076,828,999.00	14,724,218,060		
55	SURPLUS (DEFISIT)-LO	(13,076,828,999.00)	(14,724,218,060)	(1,647,389,061)	12.60

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kota Denpasar
Pengguna Anggaran



Wayan Budha, S.IP., M.A.P
NIP. 197007151992011001

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	2024	2023
1	Ekuitas Awal	1,670,151,177.71	387,772,424.00
2	Surplus (Defisit) LO	(13,076,828,999.00)	(14,724,218,060.00)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		-
	Koreksi Aset Tetap Tanah		
	Koreksi Peralatan dan Mesin		-
	Koreksi Gedung dan Bangunan		
	Koreksi Jalan Irigasi dan Jaringan		
	Koreksi Aset Lain-Lain		
	Koreksi Piutang Deviden		
	Koreksi Penyertaan Modal		
	Koreksi Pendapatan Pajak Daerah		
	Koreksi lain-lain		
	Koreksi Barang masuk antar OPD		-
	Koreksi Dana Bergulir		
	Koreksi Denda Pajak		
	Koreksi Pendapatan Retribusi		
	RK PPKD	13,006,056,426.00	10,869,676,762.00
	RK PPKD Barang	-	-
	Koreksi Barang Masuk Antar OPD	-	5,740,343,601.71
	Koreksi Barang Keluar Antar OPD	-	(603,423,550.00)
4	Ekuitas Akhir	1,599,378,604.71	1,670,151,177.71

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kota Denpasar
Pengguna AnggaranI Wayan Budha, S.IP., M.A.P
NIP. 1970077151992011001